

18 Agt. 05



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1279/MENKES/SK/VIII/2005**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN DHS (ADB) PROVINSI, WSLIC (WB) PROVINSI, KABUPATEN/ KOTA SE PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2005**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah ditetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
- b. bahwa mekanisme pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tahun 2005;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan pejabat kuasa pengguna anggaran, pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (pembuat komitmen), pejabat pengujian dan perintah pembayaran dan bendahara pengeluaran satuan kerja sementara Peningkatan Upaya Kesehatan DHS (ADB) Provinsi, WSLIC (WB) Provinsi, Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2005;
- Memperhatikan** : 1. Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) Tahun Anggaran 2005 Nomor : 19/24.01/2005 Revisi I. tanggal 22 Juli 2005
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

2

3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M tahun 2004, tentang Pengangkatan Sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI TENTANG PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN DHS (ADB) PROVINSI, WSLIC (WB) PROVINSI, KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2005**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

3

- PERTAMA** : Menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini masing-masing sebagai Pejabat yang terkait dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Satuan Kerja Sementara Peningkatan Upaya Kesehatan DHS (ADB) Propinsi, WSLIC (WB) Provinsi, Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2005;
- KEDUA** : Pejabat yang ditunjuk dalam diktum PERTAMA bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan.
- KETIGA** : Menyampaikan tandatangan dan spesimennya kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tahun anggaran 2005, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 18 Agustus 2005

Menteri Kesehatan RI

*[Signature]*  
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) 4

**Tembusan :**

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan.
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
5. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan.
7. Kepala Kantor Wilayah XXIII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Makassar
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat
9. Yang bersangkutan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1279/MENKES/SK/VIII/2005 TANGGAL : 18 AGUSTUS 2005

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBAUT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN UPAYA KESEHATAN DHS (ADB) PEROVINSI , WSLIC (WB) PROVINSI, KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2005

Nomor Urut	Nama Satker Sementara	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran	Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja (Pembuat Komitmen)	Pejabat Penguji SPM	Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Menandatangani SPM	Bendahara Pengeluaran	KPPN
1	Peningkatan Upaya Kesehatan DHS (ADB) Provinsi Sulawesi Selatan	Shermina Oruh, SKM, DESS NIP 140294640 Staf Subag Program Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	Fitrie Chadidjah, SKM, DESS NIP 140330711 Staf Subag Program Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	Asmah, SKM, M. Kes NIP 140313205 Staf Subag Program Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan	Anang Nur Imansyah, S. Sos NIP 140219207 Staf Subdin PTSTK Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan	Hj. Subaedah NIP 140045603 Staf Subdin BPK & F Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan	Makassar
2	Peningkatan Upaya Kesehatan WSLIC (WB) Provinsi Sulawesi Selatan	dr. H. Andi Muhadir, MPH NIP 140130848 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	Kasri, SKM, M. Kes NIP 140301882 Staf Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	Alimase, Amd.KI NIP. 140110701 Staf Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	Alimase, Amd.KI NIP. 140110701 Staf Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	Ermiaty Rangga Lebang, Amd.KI NIP 140133016 Staf Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan	Makassar
3	Peningkatan Upaya Kesehatan WSLIC (WB) Kabupaten Bone	dr. H. Salahuddin A Palloge, MPH NIP 140105386 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone	A. Satrian Hamzah, SE NIP 140060212 Kepala Seksi PKL Dinas Kesehatan Kabupaten Bone	Muhamad Rostang, SE NIP 140352785 Staf PKL Dinas Kesehatan Kabupaten Bone	Muhamad Rostang, SE NIP 140352785 Staf PKL Dinas Kesehatan Kabupaten Bone	H. Muhammad Idris, SKM NIP 140186059 Staf PKL Dinas Kesehatan Kabupaten Bone	Watampone



Menteri Kesehatan RI

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)